

BAB I

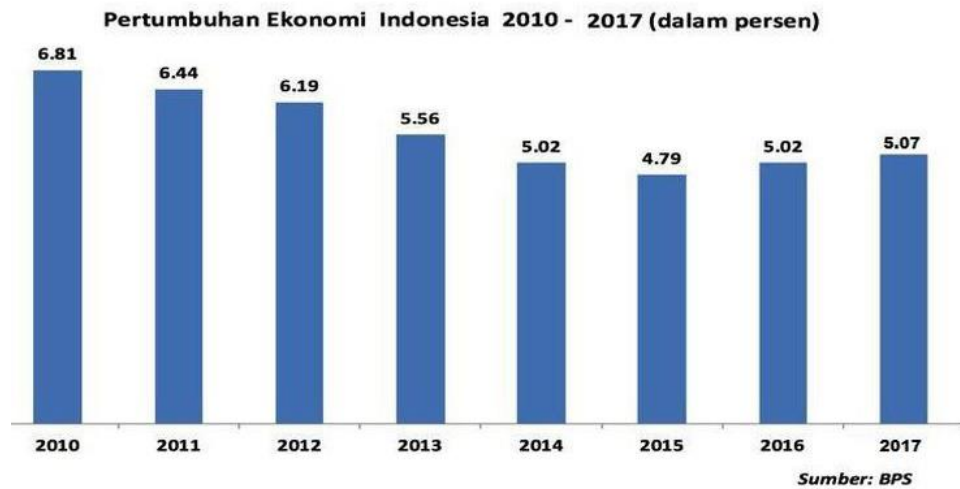
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju atau negara berkembang dapat dilihat dari salah satu indikatornya yaitu pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2014, p.5). Pertumbuhan ekonomi negara maju pada umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat, hingga pada akhirnya ada pada titik pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Sedangkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang cenderung bergerak fluktuatif. Permasalahan pertumbuhan ekonomi masih menjadi masalah yang belum tuntas terselesaikan di negara berkembang. Termasuk Indonesia.

Negara Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang harus dicapai dalam tujuan pelaksanaan pembangunan (Tambunan, 2014, p.39). Dapat dikatakan apabila pertumbuhan ekonomi negara tersebut terus meningkat, maka pembangunan ekonominya pun berjalan dengan baik sehingga nantinya akan mencapai kesejahteraan rakyat.

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 hingga 2017 bergerak fluktuatif dari data Badan Pusat Statistik disajikan dalam grafik seperti gambar I.1 :



Gambar I.1

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5

Pada tahun 2010 hingga tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,44 persen, dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 6,19 persen. Di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi belum meningkat yaitu sebesar 5,56 persen dan tahun 2014 masih mengalami penurunan yaitu sebesar 5,02 persen begitu juga pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hingga mencapai angka sebesar 4,79 persen. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan pada tahun 2010-2015.

Di tahun berikutnya yaitu tahun 2016 angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan yakni menjadi 5,02 persen. Dan pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat yakni 5,07 persen.

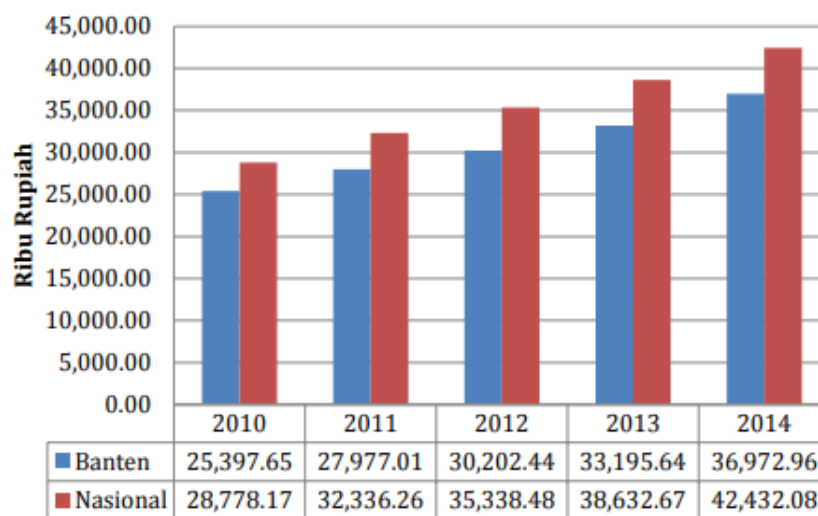
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah melakukan usaha agar perekonomian Indonesia membaik dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Awal tahun 2001 pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun dilansir dari berita Kompas, Otonomi daerah dan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia pascareformasi ternyata belum mensejahterakan rakyat. (Badrudin, 2012, p.2).

Salah satu contoh wilayah desentralisasi di Indonesia adalah pembentukan provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Sebelum menjadi provinsi, Banten merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang letaknya bersebelahan dengan provinsi ibu kota yaitu provinsi DKI Jakarta. Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang terdiri dari delapan kabupaten/kota tidak menunjukkan jumlah yang begitu besar.

Laju pertumbuhan PDRB yang diukur dari besarnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di provinsi Banten selama kurun waktu 2010 – 2014 cenderung meningkat. Jika pada tahun 2010 rasio antara PDRB perkapita Banten dan PDB nasional sebesar 88,25 persen, pada tahun 2014 rasionya menurun menjadi 87,13 persen.

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi provinsi Banten selalu meningkat, tetapi jumlahnya tidak lebih dari PDRB per kapita nasional. Grafik PDRB per kapita di provinsi Banten dan nasional ditunjukkan pada gambar I.2:



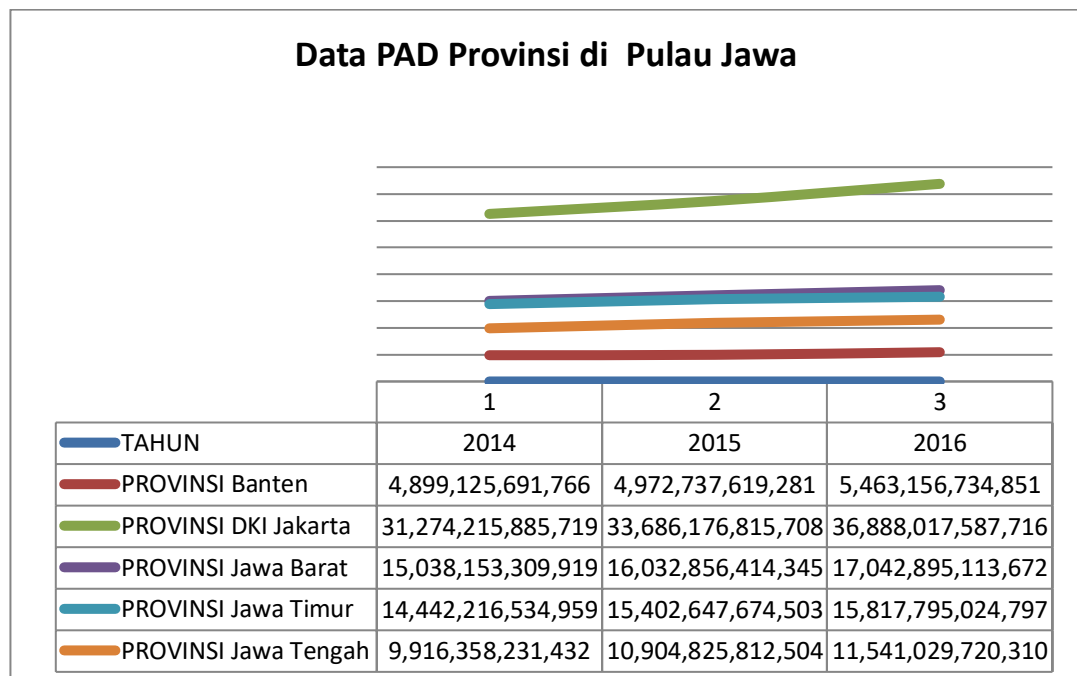
Sumber: BPS, 2014

Gambar I.2
PDRB Per Kapita ADHB

Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan (Badrudin, 2012, p. 15). Yang berisi tentang penetapan dan aturan mengenai desentralisasi fiskal yaitu penyerahan sumber keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah disertai dengan hak pengelolaannya. Beberapa ahli ekonom percaya bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan akan terjadi kemandirian

daerah serta pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membangun daerahnya.

Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat berharap daerah tidak lagi bergantung dengan transfer pemerintah pusat, dan dapat mengelola keuangan daerah nya sendiri yang dilihat dari besaran PAD.



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan (diolah penulis)

Gambar I.3

Data PAD Provinsi di Pulau Jawa (Triliun

Berdasarkan gambar 1.3 diatas, provinsi Banten pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2014 – 2016 memiliki PAD yang paling kecil diantara provinsi yang berada di pulau Jawa. Posisi yang paling tinggi PAD nya adalah

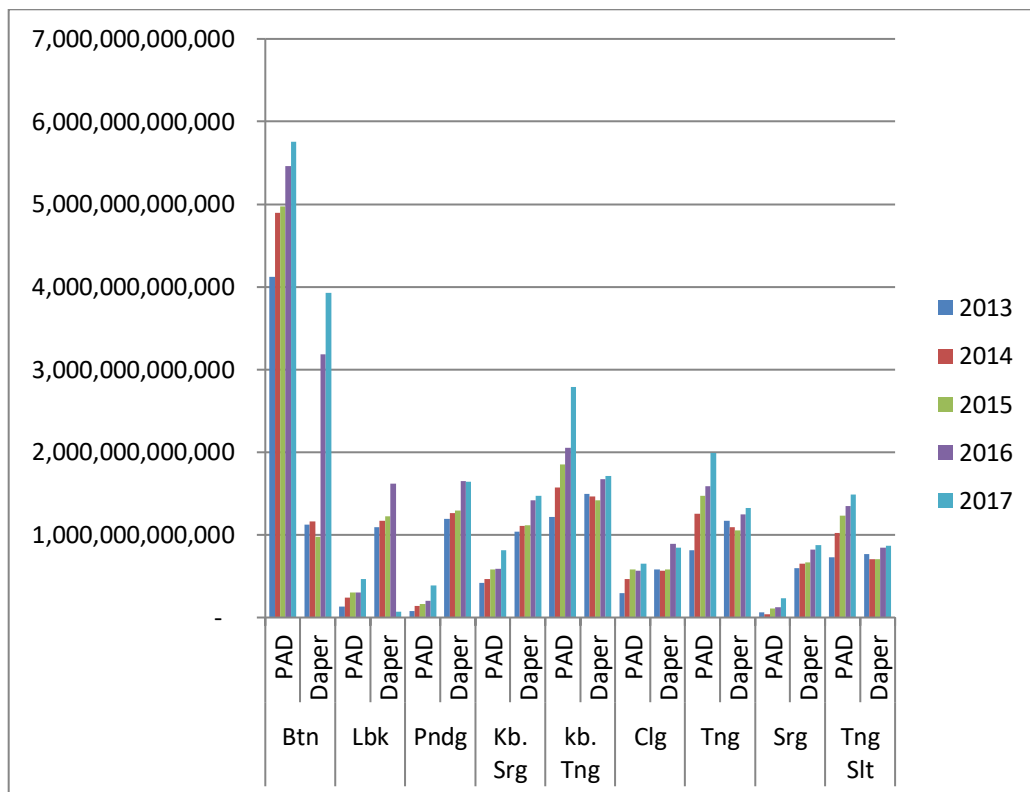
provinsi DKI Jakarta. Meskipun provinsi Banten terletak bersebelahan dengan provinsi ibukota, hal itu tidak membuat PAD provinsi Banten menyusul PAD ibukota.

Meskipun provinsi Banten memiliki PAD yang paling rendah di provinsi pulau Jawa, provinsi Banten memiliki penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jumlahnya lebih besar daripada pendapatan yang berasal dari dana perimbangan tahun 2013-2017. Hal ini menunjukkan kemampuan provinsi Banten semakin tinggi untuk membiayai kemampuan keuangannya sendiri, dan ini berarti menunjukkan kinerja keuangan yang positif.

Namun di kabupaten/kota provinsi Banten tidak semua daerahnya memiliki PAD yang lebih besar dibandingkan dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Tahun 2015 hanya empat kabupaten/kota yang memiliki PAD lebih besar daripada dana perimbangan. Empat kabupaten/kota lainnya masih memiliki PAD yang lebih kecil daripada dana perimbangan. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya hanya provinsi Banten yang memiliki PAD lebih besar dibandingkan dana perimbangannya.

Pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017 beberapa kota maupun kabupaten yang berada di provinsi Banten sudah memiliki PAD yang lebih besar dibanding dana perimbangan, namun belum konsisten. Terlihat bahwa di beberapa kota/kabupaten masih mengandalkan dana perimbangan

dari pemerintah pusat. Daerah yang dana perimbangannya terus saja lebih besar dibandingkan PAD diantaranya kabupaten Lebak, kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, kota Serang, dan beberapa tahun pada kota Cilegon. Grafik PAD dan dana perimbangan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar I.4:



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan (diolah penulis)

Gambar I.4
Pendapatan Asli Daerah/PAD dan Dana Perimbangan
Kabupaten/Kota Provinsi Banten (Milyar Rupiah)

Dari gambar 1.4 terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki dana perimbangan lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

di Provinsi Banten. Dalam jangka waktu tahun 2013-2017 yaitu kabupaten Lebak, kabupaten Pandeglang, kabupaten Serang, kabupaten Cilegon, dan kota Serang. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pengaruh dan seberapa besar pengaruhnya dana perimbangan terhadap pendapatan asli daerah dan pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi Banten tahun 2010-2016.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, dibutuhkan pengkajian yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Banten. Maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. PDRB perkapita Provinsi Banten ADHB tahun 2010-2014 jumlahnya dibawah nasional.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten tahun 2014-2016 jumlahnya selalu paling kecil diantara Provinsi di Pulau Jawa.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 4 kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2013-2017 jumlahnya lebih kecil dibandingkan dana perimbangan, yang mengindikasikan daerah belum memiliki kemandirian daerah.

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai latar belakang masalah yang telah diidentifikasi, maka penelitian ini difokuskan untuk melihat apakah terdapat pengaruh dan seberapa besar pengaruhnya dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Banten. Maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Banten”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka secara lebih khusus masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Banten?
2. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Banten?
3. Apakah terdapat pengaruh dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Banten?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan kontribusi yang lebih lengkap mengenai penelitian tentang bagaimana pengaruh dana perimbangan dan seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Banten.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan saran dan masukan bagi pembaca maupun pemerintah Indonesia pada umumnya dan pemerintah daerah di Provinsi Banten khususnya mengenai gambaran kebijakan fiskal, serta desentralisasi fiskal setiap daerah sehingga kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan akan semakin efektif bila memang terdapat pengaruh yang positif. Namun apabila hasilnya tidak terdapat kesesuaian, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan masukan agar pelaksanaan desentralisasi fiskal kabupaten/kota di provinsi Banten dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.